

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, D. M. E., & Maryono, M. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi pada Provinsi/Wilayah Kalimantan dan Sulawesi).
- Arifah, N. A., & Haryanto, H. (2019). Analisis Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2).
- Ayem, S., & Pratama, D. D. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2016. *Akuntansi Dewantara*, 2(2), 169-182.
- Febriani, D., & Asmara, J. A. (2018). Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Fungsi Pendidikan (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 3(4), 585-599.
- Kasdy, L. M., Nadirsyah, N., & Fahlevi, H. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan sisa lebih perhitungan anggaran terhadap belanja modal dan implikasinya pada realisasi belanja modal pada pemerintahan kabupaten/kota di indonesia. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(1), 1-18.
- Kosim, E. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Kota Banjar. *Journal of Management Review*, 1(1), 12-22.
- Napitu, A. E., Dillak, V. J., & Kurnia, K. (2018). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal. *eProceedings of Management*, 5(3).
- Ni Nyoman Widiasih, G. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Pada Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18, 2143-2171.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana perimbangan

Sari, D. G. Y. A., Kepramareni, P., & Novitasari, N. L. G. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota se-Bali. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 9(1), 15-29.

Simbolon, Y. C., Maksum, A., & Abubakar, E. (2020). Pengaruh PAD, SILPA, DAU, DAK dan DBH Terhadap Alokasi Belanja Modal: Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau dan Bengkulu periode 2012-2018. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2), 826-839.

Suryani, F., & Pariani, E. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. *PEKA*, 6(1), 11-22.

Undang-Undang No. 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Vanesha, V. T., Rahmadi, S., & Parmadi, P. (2019). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 14(1), 27-36.

Waskito, W., Zuhrotun, Z., & Ruserlisyani, R. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Aceh). *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 3(2), 220-238.

[www.djpk.kemenkeu.go.id/](http://www.djpk.kemenkeu.go.id/)